

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Penelitian yang dilakukan kepada anggota dewan telah lama menjadi fokus penelitian sebagai dasar literatur tata kelola yang secara teguh dilakukan karena ditopang oleh berbagai masalah seperti pengawasan tata kelola oleh anggota dewan, kelalaian frekuensi terhadap pengawasan tersebut, dan hubungannya kepada kegagalan perusahaan besar (Van Ness et al., 2010). Kompleksnya pengelolaan perusahaan di era modern akibat perkembangan teknologi memerlukan kepastian pengelolaan perusahaan yang baik sehingga meningkatkan kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan dimana parameter kesuksesan sebuah perusahaan sering kali diperlihatkan dari tingkat kinerja perusahaan tersebut (Lukiaji, 2016). Pengelolaan perusahaan juga dikaitkan dengan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang telah menjadi isu yang hangat dan berkembang pesat beberapa tahun terakhir. Perkembangan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial tersebut lahir seiring dengan adanya desakan dari masyarakat terkait peran sosial perusahaan dan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam seperti polusi tanah, air, limbah berbahaya, udara, pembangunan tidak ramah lingkungan, penggundulan hutan, hingga perubahan iklim. Dengan munculnya berbagai tragedi kemanusiaan dan masalah lingkungan seperti banjir Lumpur Lapindo dan yang sedang terjadi di dunia saat ini yaitu Pandemi Covid-19 menjadi pengingat masyarakat untuk merawat dan mengelola lingkungan yang jumlahnya terbatas dan membuat perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien (Safitri & Saifudin, 2019; Susanto & Tarigan, 2013). Hal tersebut sejalan dengan arah dari keberlanjutan untuk memastikan generasi penerus di masa yang akan datang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya serta meneruskan kehidupannya di masa mendatang. Penilaian aktivitas keberlanjutan perusahaan dibidang non-keuangan seperti kegiatan program pendidikan dan kemanusiaan yang diidentifikasi sebagai etika perusahaan akan dilakukan dengan menggulirkan tanggung jawab sosial (Amran et al., 2014; Finch, 2005; Young & Thyil, 2008). Namun, kegiatan

keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan semata-mata didorong untuk mencapai keunggulan kompetitif, bukan dari etika perusahaan sehingga sebagian besar perusahaan hanya melakukan keberlanjutan jika kegiatan tersebut dinilai menguntungkan (González et al., 2019; Rudyanto & Siregar, 2018; Zhuang et al., 2018).

Beberapa penelitian mengenai hubungan antara tata kelola perusahaan dalam hal pengungkapan laporan keuangan dan performa kinerja keuangan dengan pergantian dewan telah banyak dilakukan. Seperti studi yang dilakukan oleh Hu & Loh (2018) menghasilkan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan laporan keberlanjutan. Studi lain dilakukan oleh Anggraini & Asyik (2016) yang menyatakan bahwa dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Selanjutnya, studi yang dilakukan oleh Suryono & Prastiwi (2011) menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Van Ness et al. (2010) juga menyatakan bahwa kepentingan anggota dewan berpengaruh terhadap performa kinerja keuangan perusahaan. Tetapi, penelitian-penelitian tersebut hanya menilai pengaruh antara pergantian anggota dewan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan dan performa kinerja keuangan. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti hal yang sebaliknya, yaitu pengaruh antara pengungkapan laporan keberlanjutan dan performa kinerja keuangan terhadap pergantian anggota dewan.

Penelitian mengenai hubungan tata kelola perusahaan dengan laporan keberlanjutan sering diukur berdasarkan jumlah anggota dan jumlah rapat. Beberapa diantaranya menyarankan untuk menambah jumlah anggota direksi dan memperbanyak jumlah rapat yang diadakan seperti studi yang dilakukan oleh Hu & Loh (2018). Tetapi, pengukuran dengan jumlah rapat dinilai kurang efektif karena fokus pada pembahasan dalam rapat hanya berada pada ruang lingkup kinerja perusahaan sehingga tidak mengutamakan pembahasan mengenai laporan keberlanjutan (Hasanah et al., 2017). Sedangkan pengukuran berdasarkan jumlah anggota tidak dapat mencerminkan kinerja keseluruhan anggota dewan (Idah, 2013). Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini menggunakan pergantian anggota sebagai pengukuran untuk tata kelola perusahaan.

Pergantian anggota dewan yang terorganisir dapat menjadi salah satu cara untuk memperbaiki pengelolaan perusahaan dengan memberikan ide-ide baru yang kreatif, inovatif dan strategis sehingga menjadikan dewan berfungsi dengan baik dan sejalan dengan kebutuhan dan lingkungan perusahaan serta menghindari adanya kepentingan pribadi dari anggota dewan yang tindakannya mungkin saja akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Melalui pemilihan dan pergantian anggota dewan, perspektif dan kepentingan konstituensi internal dan external menjadi tercermin dalam komposisi dewan serta dapat mewujudkan perubahan strategis utama dari organisasi (Liu et al., 2013).

Hasil penelitian sebelumnya mengenai pergantian dewan menyatakan bahwa kinerja perusahaan yang buruk dan lebih berisiko sangat memungkinkan untuk terjadinya pergantian dewan. Hal tersebut membuat perusahaan melakukan restrukturisasi manajemen serta meningkatkan pengawasan melalui pergantian dewan sehingga menghasilkan tata kelola perusahaan yang semakin baik dan memberikan sinyal kepada perusahaan mengenai terhindarnya permasalahan yang sama dikemudian hari (Arthaud-Day et al., 2006; Asthana & Balsam, 2010; Larcker & Tayan, 2011).

Meski pergantian dewan kerap dikaitkan dengan kinerja keuangan perusahaan yang buruk, pergantian dewan juga memberikan gagasan baru dengan menyatukan pandangan dan pengetahuan serta memberi sinyal kepada *stakeholder* bahwa kegiatan operasi perusahaan berada dalam pengawasan (Garay & González, 2005; Pratiwi & Laksito, 2014). Munculnya gagasan baru tersebut mengharuskan perusahaan untuk mempersiapkan diri terhadap permasalahan yang mungkin terjadi. Salah satu hal yang perlu disiapkan adalah dengan memperbanyak pembahasan mengenai pengungkapan laporan berkelanjutan dan performa kinerja keuangan yang perlu diutamakan oleh perusahaan setelah dilakukannya pergantian dewan.

Pemerintah Indonesia melalui beberapa regulasi mengatur implementasi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial untuk mengurangi kekhawatiran dari masyarakat terhadap apa yang dilakukan oleh perusahaan. Beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia antara lain UU Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 (1) tentang Perseroan Terbatas yang mengatur perihal Tanggung Jawab

Sosial dan Lingkungan, PP Nomor 47 Tahun 2012 Pasal 4 (1) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, dan POJK Nomor 51 tentang Penerapan Laporan Keberlanjutan yang ketiganya mengharuskan perusahaan untuk melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan (OJK, 2017). Bapepam-LK juga ikut menerbitkan peraturan yang serupa dalam peraturan Bapepam-LK nomor X.K.6 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan Bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang mengartikan bahwa pemerintah benar-benar memperhatikan dan bertindak serius terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan di dalam dunia bisnis perusahaan (Lesmana & Tarigan, 2014). Menurut data GRI dan BEI tanggal 23 April 2019, di Indonesia hanya sebanyak 110 laporan keberlanjutan yang sudah dirilis dari total 629 perusahaan yang tercatat dan menjadi bukti bahwa keseriusan pemerintah tidak ditanggapi oleh perusahaan (Liputan6.com, 2019).

Dengan adanya berbagai peraturan mengenai penerapan laporan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, seluruh perusahaan diharapkan untuk ikut serta membantu merawat lingkungan dengan mempertimbangkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam kegiatan bisnisnya dan berperan aktif dalam proyek dan program yang melindungi dan menjaga perkembangan kesehatan lingkungan dan perusahaan sektor perbankan merupakan salah satunya. Seperti pada tanggal 31 Januari 2019 dalam acara Spirit Of Milenials: Green Festival 2019 yang diselenggarakan oleh 2 perusahaan BUMN Indonesia, yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. dan PT. Pupuk Indonesia Holding Company (Persero) yang juga dihadiri oleh Ibu Menteri Rini Soemarno dan Bapak Presiden Joko Widodo sebagai tamu undangannya. Salah satu tujuan digelarnya Green Festival 2019 ini adalah meningkatkan minat dan kepedulian para generasi milenial terhadap gaya hidup yang ramah lingkungan (Nasional.sindonews.com, 2019). Contoh lainnya adalah 2 penghargaan tanggung jawab sosial yang berhasil diraih oleh Bank BJB yaitu program CSR dari Program Kemitraan Bina Lingkungan dan Mitra pembangunan Jawa Barat selama 5 tahun berturut-turut sejak 2015 (cnbcindonesia.com, 2019).

Namun satu tahun sebelumnya, Mantan Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia Jakarta Sudirman I didakwa telah melakukan tindakan korupsi dan

memperkaya diri serta merugikan negara dengan jumlah lebih dari 20,5 milyar rupiah (berita-one.com, 2018). Selain itu ditahun yang sama, anak perusahaan Bank BJB yaitu Bank BJB Syariah terlibat dalam kasus kredit fiktif yang menetapkan direktur utama Bank BJB Syariah sebagai tersangka atas kasus korupsi kredit fiktif tersebut (bisnis.com, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa diperlukannya suatu penanganan internal pada Bank BRI dan Bank BJB.

Kasus lain yang melibatkan Direktur Utama perusahaan sektor perbankan adalah tindakan korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara Tbk dengan dugaan tindak pidana korupsi yaitu gratifikasi atau pemberian hadiah yang terjadi di bank tersebut (cnbcindonesia.com, 2020b). Yang sangat disayangkan adalah mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk tersebut telah menjabat sebagai Direktur Utama sejak tahun 2012 hingga 2019 sehingga gratifikasi yang diterima oleh tersangka tersebut disinyalir sebagai tanda pintu masuk dari tindak pidana korupsi lainnya (mediaindonesia.com, 2020). Selain di Indonesia, tindak pidana korupsi juga terjadi di negara Malaysia. Pada tahun 2018, mantan PM Malaysia yaitu Najib Razak diduga melakukan tindakan korupsi melalui perusahaan investasi yang dibangun olehnya pada tahun 2009 yaitu 1MDB dan membuatnya dijatuhi hukuman 12 tahun tahanan serta denda yang menjadikan kasus ini sebagai skandal korupsi terbesar dalam sejarah Malaysia (bbc.com, 2018; cnbcindonesia.com, 2020).

Tindakan korupsi yang dilakukan oleh petinggi perusahaan dapat diminimalisir dengan menerapkan dan memperkuat budaya organisasi yang transparan akan keterbukaan informasi keuangan. Hal ini dikarenakan bidang keuangan yang berisi dana nasabah sangatlah rawan untuk dimanipulasi, dan petinggi perusahaan memiliki kesempatan yang sangat luas untuk melakukan tindak pidana korupsi sehingga diperlukan sistem tata kelola perusahaan yang baik agar kepercayaan dengan nasabah terjaga dengan baik. Seperti di negara Jepang, Jerman, Denmark dan Belanda, dianutnya tata kelola perusahaan dengan *two tier board system* di Indonesia dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi tindak pidana korupsi dengan membagi *board of director* menjadi dua bagian terpisah, yaitu dewan pengawas dan dewan manajemen (Solikhah & Winarsih, 2016). Selain itu, di Singapura terdapat salah satu badan

penanggulangan korupsi tertua yaitu CPIB yang sangat berkomitmen untuk mengatasi permasalahan tindak pidana korupsi baik itu tingkat kecil maupun tinggi sehingga menjadikan Singapura sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di Asia (Hin, 2013).

Dengan diterapkannya *two tier board system* di Indonesia, pemisahan tugas antara dewan pengawas dan dewan manajemen diharapkan dapat menghasilkan tata kelola yang baik. Tetapi pada kenyataannya, sistem tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada beberapa permasalahan pada bagian tata kelola perusahaan sehingga diperlukannya suatu evaluasi pada tanggung jawab yang dibebankan kepada para dewan sehingga tata kelola perusahaan terus meningkat. Meski hasil evaluasi yang ditunjukkan kepada para dewan bukan mengartikan bahwa dewan tersebut memiliki kinerja yang buruk, pergantian direksi tetap menjadi pilihan untuk dilaksanakan didalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pergantian direksi juga dapat menjadi tanda bagi para pemegang saham bahwa perusahaan masih dapat berkembang di masa depan dengan menyelesaikan masalah dari kesalahan terdahulu dan berkomitmen untuk terus melakukan restrukturisasi kontrol dan mekanisme pengawasan untuk mencegah kesalahan yang sama di masa depan. Para pemegang saham juga bisa saja memiliki pandangan bahwa penunjukan direksi yang dilakukan dapat menjadi tanda adanya strategi optimal yang muncul sehingga menjadikan perusahaan tersebut dapat diandalkan di masa depan meski tidak sepenuhnya memperbaiki reputasi perusahaan (Berger et al., 2014; Larcker & Tayan, 2011).

Maka dari itu, berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dikemukakan peneliti tertarik untuk melakukan pengujian pengungkapan laporan keberlanjutan dan performa kinerja keuangan terhadap pergantian anggota dewan dengan *leverage*, *book-to-market ratio*, dan *firm size* sebagai kontrol.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengungkapan laporan keberlanjutan berpengaruh terhadap pergantian anggota dewan?

2. Apakah performa kinerja keuangan berpengaruh terhadap pergantian anggota dewan?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengungkapan laporan keberlanjutan terhadap pergantian anggota dewan.
2. Untuk membuktikan dan menganalisis performa kinerja keuangan terhadap pergantian anggota dewan.

### **I.4 Manfaat Hasil Penelitian**

Sesuai tujuan penelitian yang telah disampaikan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Aspek Teoritis

1. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini menjadi sarana referensi serta pertimbangan pada penelitian sejenis yang dilakukan di masa mendatang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini sebagai acuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengungkapan laporan keberlanjutan dan performa kinerja keuangan.

b. Aspek Praktis

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat dijadikan referensi oleh perusahaan dalam melakukan pergantian anggota dewan.

2. Bagi Investor

Penelitian ini berkontribusi sebagai saran mengenai praktik pergantian anggota dewan dan membantu keputusan investasi.

### 3. Bagi Pembuat Kebijakan dan Peraturan

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menjadi referensi dalam pembuatan aturan dan mekanisme pergantian anggota dewan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.